

Produksi Ruang Kekuasaan di Pulau Jawa Abad ke-16 - 17 dan Dampaknya pada Pertumbuhan Kota

Hafid Setiadi¹, Hadi Sabari Yunus², dan Bambang Purwanto³

¹Departemen Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia, Indonesia

²Departemen Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia

³Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia

Email koresponden: hafid.setiadi@ui.ac.id

Diterima : Juni 2017 ; Direvisi : Juli 2017; Dipublikasikan: September 2017

© 2017 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia.

Abstrak Studi ini membahas keterkaitan antara tradisi kekuasaan, produksi ruang, dan pertumbuhan kota. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam pola dan proses spasial produksi ruang kekuasaan dan implikasinya pada pertumbuhan kota. Lingkup penelitian mencakup situasi geopolitik di Pulau Jawa selama abad ke-16 hingga ke-17 ketika Kesultanan Mataram memegang dominasi kekuasaan berlandaskan tradisi sawah. Metode analisis yang diterapkan mengacu pada pemikiran hermeneutika yang mengedepankan metode pembacaan teks. Data penelitian berasal dari sumber-sumber sekunder terutama hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk artikel, buku, peta maupun makalah seminar. Hasil analisis memperlihatkan bahwa selama rentang waktu tersebut pola dan proses spasial produksi ruang kekuasaan didominasi oleh netralisasi dan pembentukan wilayah pinggiran sebagai konsekuensi dari absolutisme kekuasaan raja. Modus produksi ini menyebabkan terjadinya likuidasi politik terhadap kota-kota tertentu yang ditandai oleh perubahan identitas kota, terutama di wilayah pesisir.

Kata kunci: Produksi Ruang Kekuasaan, Kesultanan Mataram, Tradisi Sawah, Identitas Kota, Pertumbuhan Kota

Abstract This study discusses the relations between the tradition of power, the production of space, and city growth. This study primarily aimed to comprehend the spatial pattern and process of the production of authority space and its implications for city growth. It covers the geopolitical situation in Java during the 16th and 17th centuries when the Mataram Sultanate ran a dominant power based on ricefield tradition. The analysis method applied in this study referred to hermeneutical thinking, which foregrounds a text reading method. The research data was obtained from secondary resources, especially published research in the forms of articles, books, maps, and seminar papers. The analysis results showed that the spatial pattern and process of authority space production within these centuries were dominated by neutralization and the formation of peripheries, i.e., the consequence of the king's absolute power. This production mode resulted in the political liquidation of certain cities and, thereby, changed the identity of the said cities, especially those located in coastal areas.

Key words: Production of Authority Space, Mataram Sultanate, Ricefield Tradition, City Identity, City Growth

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1980-an, kajian geografi diramaikan oleh aliran baru yang dikenal sebagai aliran Neo-Marxian (Ritzer and Goodmann, 2003). Berbeda dengan gagasan awal Marxisme yang memandang manusia sebagai makhluk pekerja, aliran Neo-Marxian lebih memandang manusia sebagai makhluk budaya yang berpikir (Adian, 2006). Cara pandang ini mendorong kelahiran aliran geografi humanistik yang berkembang di bawah tradisi pemikiran kritis (Johnston, 1983; Blomley, 2006). Kemunculan aliran baru ini merupakan salah satu momentum penting dalam perkembangan disiplin geografi yang menandai semakin besarnya perhatian terhadap peranan unsur subjektivitas dan konstruksi sosial dalam membentuk gejala keruangan (Buttimer, 2003). Ruang tidak lagi dipahami sebagai sebuah wujud fisik; melainkan sebagai representasi dari kesadaran, pengetahuan, dan perasaan manusia (Tuan, 1977; Cavalaro, 2001; Milun, 2007).

Salah satu tema utama dalam Neo-Marxian adalah produksi ruang yang dilandasi oleh pemikiran Henry Lefebvre. Menurut Lefebvre (1991), produksi ruang sangat terkait dengan berbagai praktek yang dilakukan oleh manusia serta bagaimana praktek-praktek tersebut berinteraksi dengan unsur-unsur ruang baik yang dapat dideteksi oleh indera maupun yang terkonsepsi dalam pikiran manusia. Produksi ruang juga terkait dengan subjektivitas dan persaingan kekuasaan (Johnston dkk., 2000). Proses-proses keruangan dipahami sebagai wujud dari dialektika antara sistem politik, ekonomi, dan sosial (Smith and O'Keefe, 1980; Cox, 2005). Soja (1980) menyebut proses ini sebagai socio-spatial dialectic yang dapat menyebabkan perubahan struktur keruangan secara radikal sebagai cermin dari perubahan-perubahan fundamental situasi sosial politik masyarakat. Perubahan fundamental tersebut merupakan implikasi dari adanya pola-pola dominasi dan resistensi di tengah masyarakat (Johnston dkk., 2000).

Dalam kajian geografi politik, salah satu implikasi penting dari perkembangan di atas adalah munculnya geopolitik kritis yang meyakini gejala-gejala geopolitik sebagai konsekuensi dari berbagai praktek keruangan dan jejaring kekuasaan dalam suatu struktur sosial politik tertentu (Agnew, 1998; O'Tuathail and Dalby, 1998). Ruang kekuasaan pun dipahami sebagai wujud kesadaran manusia dalam suatu konstruksi politik yang dinamis serta berperan penting dalam membentuk identitas politik, budaya dan sosial. Berbagai gejala keruangan yang terkait dengan kekuasaan dipandang sebagai sebagai wujud eksistensi dan identitas kekuatan politik tertentu yang sarat dengan makna. Tema-tema yang terkait dengan produksi ruang seperti pemaknaan, komodifikasi, pencitraan, dan simbolisasi lokasi semakin mengemuka (Mammadouh, 1998).

Sebagai bagian dari geografi kritis, studi ini menelaah mengenai produksi ruang kekuasaan di Pulau Jawa abad ke-16 hingga abad ke-17. Merujuk pada Soja (2000), produksi ruang kekuasaan dapat dipahami sebagai teritorialitas. Berlandaskan pada pendapat Deleuze dan Guattari, Soja menjelaskan teritorialisasi sebagai restrukturisasi identitas teritorial yang dipengaruhi oleh hubungan antara ruang, pengetahuan, dan kekuasaan. Restrukturisasi identitas dapat berupa "deteritorialisasi" atau "reteritorialisasi". Jika deteritorialisasi memperlihatkan gejala pelemahan ikatan antara identitas dan teritori, maka reteritorialisasi justru memperlihatkan gejala penguatan. Restrukturisasi identitas juga terkait dengan konsepsi ulang (re-conception) terhadap teritori baik dengan cara perombakan batas, pemberian penafsiran baru, atau pun penyematan simbol-simbol baru. Soja (2000) juga berkeyakinan bahwa deteritorialisasi dan reteritorialisasi merupakan dua proses teritorial yang saling terkait, bahkan dapat terjadi pada saat yang bersamaan.

Pandangan Soja (2000) dapat dikombinasikan dengan pendapat Taylor (1993) tentang geopolitical code dan geopolitical order untuk menjelaskan produksi ruang kekuasaan. Kode geopolitik (geopolitical code) mencerminkan konsep ruang yang dianut oleh suatu kekuasaan berdasarkan sistem nilai tertentu. Konsep ini merepresentasikan subjektivitas penguasa dalam teritorialisasi. Kode geopolitik mempengaruhi pemaknaan, penafsiran, dan perlakuan penguasa terhadap tempat-tempat tertentu. Sementara itu, tatanan geopolitik (geopolitical order) mencerminkan jaringan spasial suatu kekuasaan yang terangkai antar-tempat. Tatanan geopolitik merupakan produk dari pemberlakuan kode geopolitik tertentu oleh rezim kekuasaan. Peralihan kekuasaan dari satu rezim ke rezim yang lain akan diikuti oleh pergantian kode geopolitik dan berujung pada perubahan tatanan geopolitik.

Penetapan situasi Pulau Jawa pada abad ke-16 hingga ke-17 sebagai cakupan utama studi ini didasarkan

pada fakta historis bahwa pada masa itu kekuasaan politik dan ekonomi di Pulau Jawa telah beralih dari Kesultanan Demak yang berbasis perdagangan maritim ke Kesultanan Mataram yang berbasis persawahan (Lombard, 2005b; Mulyana, 2003). Perbedaan basis kekuasaan menunjukkan perbedaan sistem nilai, pandangan, kepentingan, serta cara dalam menciptakan dan mengelola wilayah kekuasaannya. Salah satu produk dari perbedaan itu adalah kemunculan dan keruntuhan kota. Dalam hal ini, kota berkedudukan sebagai simbol sekaligus titik konsolidasi kekuasaan politik yang tidak tumbuh di sembarang tempat (Evers and Korff, 2002; Gilbert dan Gugler, 2007). Pertumbuhan kota senantiasa terkait dengan pembentukan negara (Field, 1999). Kota merupakan bagian dari sebuah lingkungan lebih luas di mana kekuatan-kekuatan politik saling bersaing demi memperkokoh eksistensinya. Ulasan di atas menunjukkan bahwa gejala pertumbuhan kota mengandung dimensi geopolitik yang sangat kental (Dikshit, 1982; Agnew, 2001). Oleh sebab itu, studi ini bertujuan untuk menelaah gagasan serta praktek kekuasaan tertentu yang terkait dengan penguasaan dan pengendalian teritorial di balik pembentukan kota.

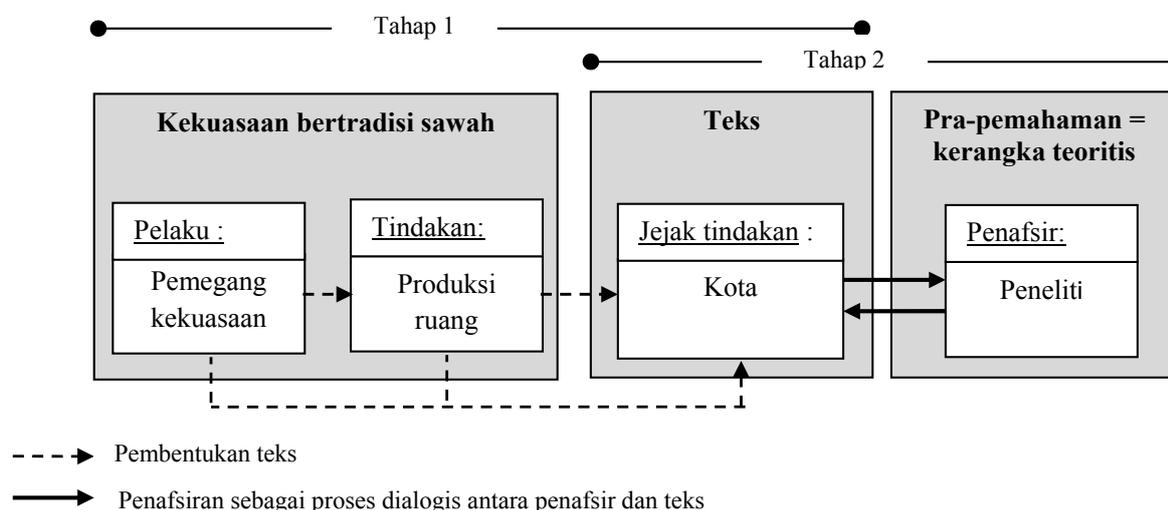
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merujuk pada pemikiran geografi interpretatif. Hoggart dkk. (2000) menyatakan geografi interpretatif senantiasa berupaya mencari dan menemukan makna dari suatu fenomena tertentu. Data yang digunakan adalah data kualitatif berupa teks dan peta yang dikumpulkan melalui studi literatur terhadap karya-karya ilmiah yang telah dipublikasikan seperti buku, laporan penelitian, dan makalah seminar. Terkait dengan keperluan klarifikasi dan validasi, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi terhadap data atau informasi yang diperoleh dari beberapa sumber. Unit analisis yang digunakan mencakup unit analisis non-spasial yaitu aktor kekuasaan dan unit analisis spasial yaitu kota. Aktor kekuasaan dipandang sebagai subjek yang aktif melakukan praktek-praktek politik didasari oleh kesadaran, harapan, motif, serta kepentingan yang khas. Adapun mengenai kota, penelitian ini memahaminya sebagai produk sekaligus simbol suatu kekuasaan yang bekerja menurut tradisi tertentu dalam suatu sistem regional.

Penelaahan dilakukan berdasarkan suatu pemikiran bahwa produksi ruang kekuasaan merupakan hasil tindakan para penguasa berdasarkan pemaknaan dan imajinasi spasialnya. Kemunculan serta keruntuhan kota-kota merupakan jejak dari tindakan tersebut yang tercermin melalui perubahan identitas kota demi membangun eksistensi suatu kekuasaan. Pemikiran ini memposisikan kota sebagai sebuah teks. Berdasarkan pemikiran tersebut, langkah berikutnya adalah memperdalam pemahaman dengan menerapkan metode penafsiran berdasarkan prinsip hermeneutika

yang memposisikan peneliti sebagai penafsir teks. Sebagaimana dijelaskan oleh Ricoeur (2008), teks adalah tindakan manusia yang meninggalkan jejak, sehingga terbuka ditafsirkan. Kegiatan penafsiran dilakukan dalam dua tahap yang masing-masing tahap menggambarkan pembentukan teks dan proses dialogis antara penafsir dan teks (Gambar 1). Tahapan tersebut mencakup empat unsur utama yaitu (1) pemegang

kekuasaan sebagai pelaku tindakan, (2) produksi ruang kekuasaan sebagai wujud tindakan, (3) kota sebagai jejak tindakan, dan (4) peneliti sebagai penafsir. Hasil pemahaman dan penafsiran terhadap teks selanjutnya diberi makna spasial untuk menunjukkan bahwa produksi ruang kekuasaan menimbulkan jejak berupa pola spasial pertumbuhan kota.



Gambar 1. Tahap Penafsiran

HASIL DAN PEMBAHASAN

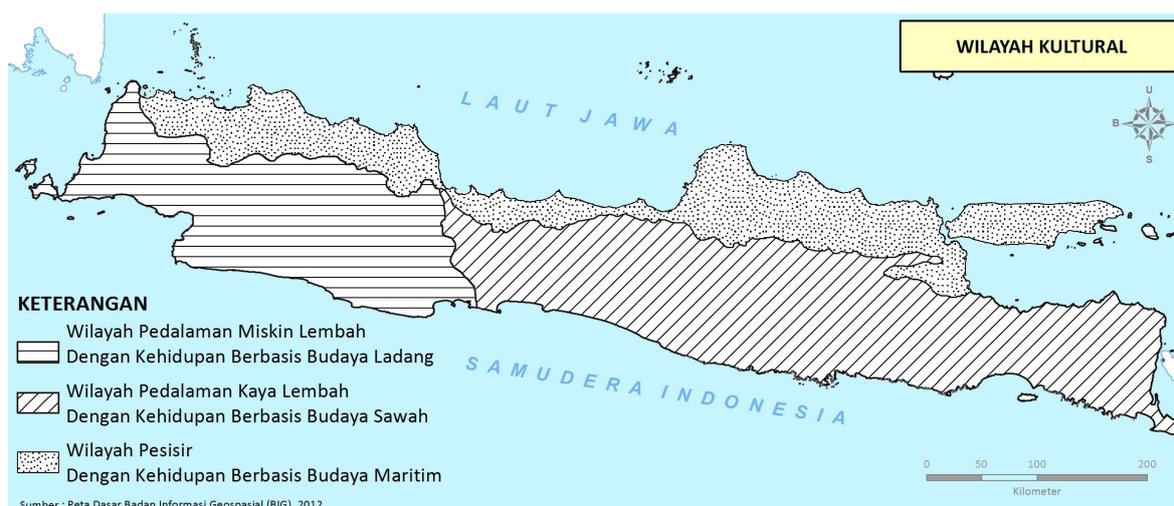
Tradisi Sawah Sebagai Basis Geopolitik Pulau Jawa Abad XVI - XVII

Pulau Jawa sering dihubungkan dengan sebuah tempat bernama Yavadvipa (Coedés, 2010). Istilah Yava merujuk pada biji-bijian yang menyerupai padi. Adapun dvipa dapat berarti “pulau”. Jadi Pulau Jawa dapat diartikan sebagai pulau padi atau pulau penghasil beras. Selain Yavadvipa, nama Jawa juga sering dikaitkan dengan istilah jewawut. Raffles (1817) dalam buku *History of Java*, memberikan catatan kaki yang menjelaskan jewawut sebagai tanaman rumput berspecies *panicum italicum*. Hasil utama tanaman ini adalah biji-bijian yang dapat diolah sebagai bahan makanan. Nama-nama di atas mengindikasikan bahwa Pulau Jawa adalah wilayah yang kaya akan sumber makanan yang selalu dikaitkan dengan padi.

Sebenarnya padi bukanlah tanaman endemik Pulau Jawa (Bellwood, 2000). Oleh sebab itu, bagi Pulau Jawa budidaya padi juga dapat dikatakan sebagai tradisi asing. Sawah-sawah pertama di Pulau Jawa dibuka di Dataran Kedu dan Lembah Brantas (Geertz, 1983). Namun pada akhirnya tradisi sawah pun menjadi cultural core bagi kehidupan penduduk di Pulau Jawa. Tradisi sawah turut menentukan corak kehidupan di

Pulau Jawa baik dari segi ekonomi, budaya, maupun politik (van Setten van der Meer, 1979; Lombard, 2005c; Santoso, 2008).

Dalam hal budidaya padi, pada masa lalu penduduk Pulau Jawa juga mengenal adanya tradisi ladang berpindah (huma) selain tradisi sawah. Jika tradisi sawah berasosiasi dengan orang Jawa (Wong Jowo), maka tradisi ladang berasosiasi dengan orang Sunda (urang Sunda). Secara fisiografi, batas spasial antara kedua tradisi tersebut adalah Lembah Ci Tanduy. Sebelah barat lembah ini terdapat wilayah dataran tinggi dengan puncak-puncak gunung yang sangat rapat, tertutup hutan lebat, dan bercurah hujan tinggi. Sebelah timurnya terdapat wilayah dengan puncak-puncak vulkanik yang saling terpisah, lembah-lembah sungai besar, dan curah hujan relative lebih sedikit. Kondisi fisiografi di sebelah timur Lembah Ci Tanduy lebih sesuai bagi kegiatan persawahan daripada sebelah barat. Oleh sebab itu, tradisi sawah sebenarnya lebih merujuk pada wilayah bagian tengah hingga ujung timur Pulau Jawa yang dikenal sebagai Tanah Jawa (Gambar 2). Geertz (1983) menyebut wilayah ini sebagai “Indonesia Dalam”. Adapun bagian barat Pulau Jawa yang kental dengan tradisi ladang lebih dikenal sebagai Tanah Pasundan.



Gambar 2. Wilayah kultural sebagai basis tradisi kekuasaan

Berbeda dengan para peladang, masyarakat sawah adalah masyarakat yang hidup menetap, membentuk permukiman-permukiman besar, mengembangkan ikatan sosial, serta memelihara kolektifitas. Tempat-tempat yang cocok untuk menanam padi dipandang sebagai tempat strategis untuk menyemai suatu masyarakat yang terorganisasi (Ricklefs, 2005). Dalam kaitan tersebut, Sumardjo (2007) menyatakan bahwa konsep ruang dalam budaya sawah terwujud sebagai “kesatuan besar yang dikendalikan oleh satu pusat utama”. Menurutnya, fungsi utama “pusat” adalah untuk mengatur dan mengendalikan organisasi sosial dan sumberdaya yang sangat besar.

Masuknya tradisi India di Pulau Jawa yang diperkirakan sejak abad ke-5 mempertegas peran penting pusat. Ajaran Hindu-Budha yang terkandung dalam tradisi India turut memperkenalkan konsep tentang “gunung suci”. Konsep ini terkait dengan keyakinan akan kedudukan Gunung Meru di India sebagai poros utama yang menghubungkan dunia dewa dan dunia manusia (Heine-Geldern, 1942). Puncak gunung menjadi simbol eksistensi kesucian dewa di tengah kehidupan manusia. Melalui poros tersebut, kesucian dewa dapat diraih dan diturunkan kepada figur-figur tertentu, sehingga melahirkan gagasan “raja sebagai titisan dewa” (Moertono, 1985; Sumardjo, 2007; Santoso, 2008). Pada masyarakat sawah di Pulau Jawa, gagasan ini mempertegas pentingnya sentralisasi kekuasaan (van Setten van der Meer, 1979; Lombard, 2005b). Gagasan juga ini memberi andil besar bagi berlangsungnya mekanisme penggabungan wilayah di Pulau Jawa melalui konsep kerajaan yang berbasis pada sistem kekuasaan terpusat (Lombard, 2005b). Berkenaan dengan itu, peneliti asal Belanda, J.S. Furnival (2009) menyatakan:

Di Jawa kita melihat dinasti susul menyusul naik ke puncak kekuasaan mulai dari daerah persawahan di timur kemudian bergerak ke barat ke daerah

pegunungan tengah dan dari situ mereka memperluas wilayah sampai ke seluruh pulau, tapi barulah menjelang 1300 muncul dinasti Majapahit yang berhasil bertahan di tengah sambil menjaga hubungan dengan daerah persawahan dan pelabuhan yang ramai di tengah (Furnival, 2009:8).

Tradisi sawah merupakan basis geopolitik penting bagi Kerajaan Hindu Majapahit ketika mencapai masa kejayaannya di abad ke-13. Penguasaan Majapahit atas wilayah subur di Lembah Madiun dan Lembah Brantas merupakan faktor penentu bagi kekuatan perdagangan maritimnya yang mencakup sebagian besar kawasan Asia Tenggara (Rahardjo, 2011; Mulyana, 2005; Lombard, 2005b). Pola serupa dilanjutkan oleh penguasa Islam pada masa Kesultanan Demak yang berkuasa di Pulau Jawa pada abad ke-15. Reputasi Demak sebagai pewaris kejayaan maritim Majapahit juga ditentukan oleh penguasaannya atas wilayah produsen beras di Pengging-Pajang dan Dataran Kedu (de Graff dan Pigeud, 2003). Berbasis pada perdagangan beras, Kesultanan Demak menjadi aktor utama di balik “kebangkitan politik daerah pantai” di Pulau Jawa (Lombard, 2005b). Kejayaan maritim tersebut berakhir pada abad ke-16 seiring dengan runtuhnya Kesultanan Demak. Penguasa baru yang berkedudukan di Pajang tampaknya tidak tertarik untuk mengembangkan perdagangan maritim. Kesultanan Pajang memutar orientasi kekuasaan di Pulau Jawa untuk kembali sepenuhnya ke pedalaman (Ricklefs, 2005). Akhirnya menjelang abad ke-17 Kesultanan Mataram menghentikan sama sekali politik perdagangan maritim dan menggantinya dengan politik persawahan (Reid, 1993; Burhanudin, 2012).

Dalam politik agraris Kesultanan Mataram, desa-desa ditempatkan sebagai sumber pembiayaan pemerintahan melalui sistem lungguh dengan cara “membagi desa-desa di antara para penguasa” (Moertono, 1985). Sistem ini mengendalikan tingkat produksi padi dan mengatur jumlah uang yang akan

disetor ke kas kerajaan (Lombard, 2005c). Sebagai sumber kekayaan kerajaan, para petani dan keluarganya dipandang sebagai “makanan negara” (Moertono, 1985). Mereka tersebar di desa-desa dan ditempatkan pada hirarki terbawah. Jumlah mereka dijadikan sebagai dasar untuk memperhitungkan besaran pajak yang akan disetorkan oleh setiap desa ke kas kerajaan. Melalui system lungguh, Kesultanan Mataram telah mengembalikan modal kekuasaan di Pulau Jawa pada penguasaan tanah dan penduduk setelah sebelumnya pada masa Kesultanan Demak sempat beralih ke kekuasaan berbasis kekayaan uang yang diperoleh dari jaringan perdagangan maritim.

Konsep Ruang Tradisi Sawah

Kalangan masyarakat sawah Pulau Jawa mengenal adanya konsep mancapat yang merupakan unsur pokok bagi mentalitas masyarakat sawah Pulau Jawa (Lombard, 2005b). Melalui hasil kajiannya yang dipublikasikan ada tahun 1917, F.D.E van Ossenbruggen berpendapat bahwa arti suku kata pat dalam kata mancapat adalah satuan ruang, sedangkan suku kata manca merujuk pada kelima titik yang membentuk ruang tersebut (Santoso, 2008). Mancapat dengan demikian dapat disebut sebagai konsep kesatuan lima (Sumardjo, 2002). Kesatuan lima merujuk pada eksistensi empat mata angin ditambah titik kelima yang terletak tepat di tengah (Lombard, 2005c; Santoso, 2008). Secara keseluruhan, konsep mancapat atau kesatuan lima mengandung prinsip dan pola dasar produksi ruang kekuasaan di dalam tradisi sawah.

Bagi masyarakat sawah di Pulau Jawa, konsep mancapat merupakan wujud pemberlakuan hukum dan tatanan alam semesta pada kehidupan manusia. Jadi, tatanan yang berlaku pada kehidupan manusia merupakan replika dari tatanan alam semesta (Heine-Geldern, 1942; Mulder, 2001; Santoso, 2008). Dalam Mancapat terdapat satu kekuasaan absolut yang menjadi titik pertemuan keempat elemen lainnya. Titik absolut itu adalah pusat. Sebagai titik pertemuan, pusat berperan penting untuk memadupadankan berbagai varian yang muncul dalam kehidupan. Pusat adalah wujud sintesis dari segala unsur kehidupan guna menciptakan energi bagi keseluruhan sistem kehidupan (Lombard, 2005b).

Konsep mancapat menekankan perilaku aktif dari suatu pusat. Pusat adalah pemegang, pelaksana, dan sekaligus pemelihara kekuasaan (Lombard, 2005c). Pusat akan menarik elemen-elemen luar untuk masuk ke dalam lingkaran pengaruhnya. Jadi konsep mancapat tidak mengenal adanya elemen luar. Konsep ini memahami bahwa “semua ruang adalah ruang dalam” (Sumardjo, 2002). Setiap elemen luar selalu diupayakan untuk ditarik ke dalam. Selain harus menunjukkan loyalitasnya kepada pusat, setiap elemen luar tersebut dituntut untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan kedudukannya dalam hirarki. Geertz (1983b) dan

Rahardjo (2007) menjelaskan kecenderungan ini dengan istilah yang berbeda. Jika Geertz menggunakan istilah “kecenderungan introversif”, maka Rahardjo menggunakan istilah “sentripetal”. Keduanya menggambarkan bahwa tradisi sawah memiliki kecenderungan untuk lebih mementingkan hubungan ke dalam dari pada ke luar.

Eksistensi dan peran penting pusat menegaskan karakter mancapat sebagai suatu tatanan kerja masyarakat sawah. Dalam tatanan tersebut terdapat struktur sosial hirarkis yang dikendalikan oleh suatu otoritas tertentu (Wittfogel, 1957; Braudel, 1979). Setiap upaya untuk meningkatkan produksi selalu menuntut otoritas terpusat yang semakin kuat (van Setten van der Meer, 1979). Setiap pelaksanaan tugas bukan hanya dimaksudkan untuk menunjukkan eksistensi diri, tetapi juga untuk menciptakan manfaat bagi kepentingan bersama. Meminjam istilah yang disampaikan oleh Mulder (2001), tatanan mancapat mencerminkan totalitas kehendak yang dibangun berdasarkan semangat kerukunan. Setiap elemen melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan hirarkinya masing-masing tanpa menimbulkan gangguan pada keseluruhan tatanan. Jakob Sumardjo (2002) dan Nigel Mulder (2001) mendeskripsikannya sebagai berikut:

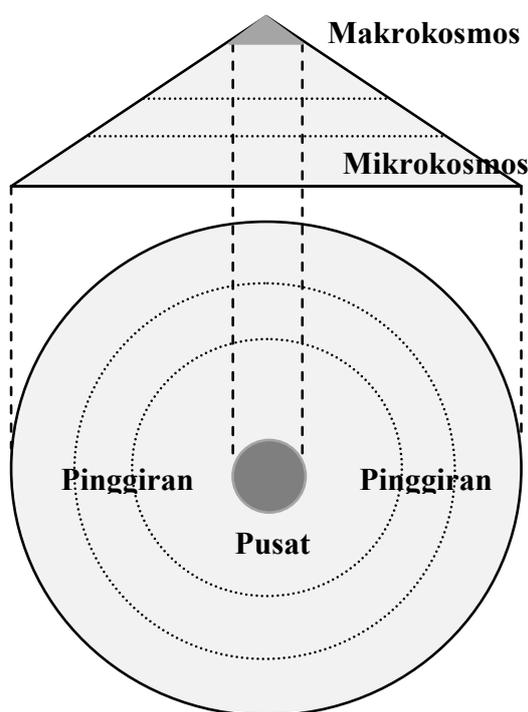
Masyarakat sawah adalah masyarakat kerja. Setiap orang mempunyai tempatnya yang tepat dalam kelompoknya. Etika kerajinan, etika profesi, dan etika kerjasama (solidaritas) menjadi dasar moralitas ruang. Hirarki ruang menjadi penting. Dan setiap ruang memiliki nilainya sendiri. Masyarakat ini sangat mementingkan sifat komunalnya (dependen-kolektif), solidaritas yang kuat, produktif, dan lokalitas yang kuat (Sumardjo, 2002:23-24)

Gagasan mengenai kesederajatan...sama sekali asing...bahkan mengganggu. Hingga batas di mana orang tidak sederajat secara moral, hingga batas itu pula ada hirarki yang menjadi tulang punggung organisasi sosial...hirarki organisasi yang jelas menjamin ketertiban, hirarki yang kondusif untuk menghindari konflik terbuka dan mempertahankan keseimbangan... Ketidaksederajatan moral muncul secara alamiah (Mulder, 2001:99)

Bagi masyarakat sawah, petani identik dengan sawahnya (Sumardjo, 2002). Menghimpun para petani berarti menghimpun petak-petak sawah yang terbentang luas pada beberapa desa. Meskipun setiap petani memiliki sawah, namun keberhasilan pengusahaannya ditentukan oleh kebersamaan, keharmonisan, serta keseimbangan sosial para petani dalam suatu kesatuan besar (Sumardjo, 2007). Ukuran dari kesatuan tersebut akan terus membesar seiring dengan upaya peningkatan produksi. Teritori pun akan semakin meluas. Masyarakat tipe ini menuntut kehidupan ekonomi dan politik yang stabil (Rahardjo, 2007). Organisasi keruangan para petani pun dicirikan oleh ikatan sosial yang kuat dan luas hingga melampaui

batas-batas kekerabatan dalam suatu tatanan hirarkis-konsentris. Ikatan sosial jauh lebih penting dari pada ketegasan batas teritorial.

Tatanan konsentris-hirarkis (Gambar 3) yang berlaku pada tradisi sawah tidak dapat dilepaskan dari konsep manunggaling kawula gusti yang bermakna “kemanunggalan antara hamba dan Tuhan” (Mulder, 2001; Sunyoto, 2012), atau “manusia di dalam Tuhan” (Zoetmulder, 2000), atau “kesatuan yang sesungguhnya dengan Tuhan” (Moertono, 1974). Konsep ini berakar dari gagasan “raja sebagai titisan dewa” yang menempatkan raja sebagai agen utama keselarasan dan kesejajaran antara dunia dewa (makrokosmos) dan dunia manusia (mikrokosmos). Meskipun konsep ini dilandasi oleh asumsi kesamaan derajat manusia di hadapan Tuhan (Sunyoto, 2012), namun manusia-manusia tertentu dapat “bergerak naik” hingga tingkat tertinggi selama mereka mampu mempertajam kemampuan batin, memperdalam intuisi, dan menemukan kesejajaran eksistensi dirinya sebagai hamba Tuhan (Mulder, 2001). Ketika sudah berada pada tingkat tertinggi pun, seorang hamba Tuhan juga harus “bergerak turun” untuk memberikan bimbingan, perlindungan, serta kasih sayang kepada mereka yang berada di tingkat bawah (Moertono, 1974).



Gambar 3. Tatanan Ruang Konsentris-Hirarkis Masyarakat Sawah

Seiring dengan menguatnya pengaruh ajaran Islam, gagasan “raja sebagai titisan dewa” akhirnya berubah menjadi “raja sebagai Wakil Allah SWT”. Dalam kekuasaan Kesultanan Mataram gagasan tersebut

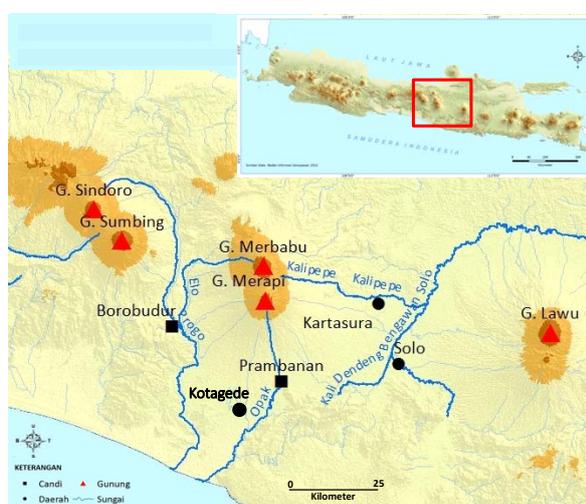
mengalami penguatan bersamaan dengan kembalinya primordialisme tradisi sawah. Peleburan antara ajaran Islam, warisan Hindu-Jawa, dan tradisi sawah akhirnya melahirkan konsep manunggaling kawula gusti. Pada masa ini penataan kekuasaan politik berjalan bersama-sama dengan apa yang disebut oleh Burhanudin (2012) sebagai “upaya penerjemahan Islam ke dalam inti budaya Jawa”. Para penguasa berupaya mensintesis Islam dengan budaya Jawa dan merangkulkannya ke dalam pusat kekuasaan (Reid, 1993). Melalui sintesis tersebut, konsep kekuasaan Islam yang diusung oleh Kesultanan Mataram “harus dapat menyesuaikan diri dengan konsep raja sebagai poros dunia” (Lombard, 2005b).

Kesempurnaan dan kesucian raja dengan demikian menjadi kode geopolitik terpenting dalam pola kekuasaan di Pulau Jawa abad ke-17 di bawah Kesultanan Mataram. Raja memegang kendali penuh atas semua aspek kehidupan sehingga melahirkan absolutisme kekuasaan. Absolutisme tersebut menjadikan istana raja atau kraton menjadi titik sentral bagi seluruh aspek kehidupan. Istana menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi sakral dan fungsi profan. Jika fungsi sakral merujuk pada kesempurnaan, kesucian, kemuliaan, kewibawaan, kesaktian serta keunggulan batin sang raja, maka fungsi profannya lebih terkait dengan perannya sebagai penghubung antara raja dan para pejabat, bangsawan, serta penguasa daerah yang berkedudukan di luar istana (Santoso, 2008). Kedudukan istana sebagai “pusat tunggal yang dominan” pun mencapai tingkat yang paling sempurna. Istana tidak dapat didirikan pada sembarang lokasi karena lokasi istana harus merepresentasikan kesempurnaan dan kesucian kekuasaan raja. Berdasarkan hal tersebut, pengkultusan terhadap figur raja harus didukung oleh pengkultusan terhadap lokasi istananya. Pengkultusan ganda ini menjadi landasan penting bagi berlangsungnya proses dan pola produksi ruang kekuasaan.

Pengkultusan ganda tersebut tidak dapat dilepaskan dari apa yang disebut oleh Wessing (2008) sebagai proses pendewaan terhadap tanaman padi. Tanaman padi tidak hanya dipandang sebagai sumber makanan pokok, melainkan juga sebagai lambang kemuliaan dan kesuburan alam. Eksistensi Dewi Sri sebagai lambang kesuburan dalam kehidupan masyarakat sawah di Pulau Jawa menunjukkan adanya kesetaraan derajat kemuliaan antara kesuburan tanah dan kesuburan wanita (Ricklefs, et al, 2013). Tanah subur dipandang memiliki tingkat kesucian yang tinggi seperti kesuburan rahim wanita. Padi itu sendiri dipandang sebagai benih kehidupan yang akan disemai dan ditanam di dalam rahim. Dalam perspektif geopolitik, kepercayaan di atas dapat dimaknai “di mana padi dapat ditanam, di tempat itu pula kekuasaan dapat berkembang”. Penghormatan, pemujaan, serta pemuliaan terhadap tanah-tanah subur merupakan bagian penting bagi keberlanjutan kehidupan.

Proses dan Pola Produksi Ruang Kekuasaan di Bawah Tradisi Sawah

Pada abad ke-16 pusat kekuasaan politik di Pulau Jawa telah berpindah dari pesisir utara (Demak) ke suatu dataran subur di antara Gunung Sumbing dan Gunung Lawu di mana terdapat Dataran Kedu dan Lembah Bengawan Solo. Lombard (2005a) menyebut wilayah ini sebagai “jantung” Pulau Jawa (Gambar 4), yaitu tempat tertanamnya kebudayaan Jawa yang paling murni dan paling halus. Jauh sebelum kemunculan Kesultanan Mataram, Dataran Kedu juga pernah menjadi pusat kekuasaan Dinasti Syailendra pada abad ke-8 yang beraliran Budha Mahayana. Syailendra itu sendiri berarti “raja gunung” (Coëdès, 2010). Dinasti ini meninggalkan karya monumental berupa Candi Borobudur.



Gambar 4. Dataran Kedu sebagai Jantung Pulau Jawa

Tidak jauh dari Candi Borobudur, terdapat Candi Hindu Prambanan. Santoso (2008) menilai Candi Prambanan lebih memperlihatkan keaslian budaya Jawa dari pada Candi Borobudur. Menurutnya, Candi Prambanan menandai peleburan antara budaya Jawa dan tradisi India. Candi ini merupakan replika dari struktur makrokosmos yang selalu dikaitkan dengan eksistensi Gunung Meru di India sebagai pusat dunia. Nilai kesakralan Prambanan terletak pada representasinya sebagai “rumah” para dewa yang mengatur kehidupan dunia (Jordan, 2009). Keberadaan Candi Prambanan juga sering ditafsirkan sebagai “pembenaran atas penguasaan tanah untuk membangun suatu sistem kekuasaan” (Santoso, 2008). Ditinjau dari perspektif geopolitik, penafsiran tersebut mempertegas identitas Dataran Kedu sebagai tempat ideal bagi berkembangnya suatu kekuasaan besar.

Kemunculan pusat kekuasaan Kesultanan Mataram di jantung Pulau Jawa dengan demikian bukan suatu kebetulan. Pusat kekuasaan Islam ini muncul pada suatu tempat yang telah terlegitimasi secara kultural-

religius sejak berabad-abad sebelumnya sebagai “tempat suci yang ideal bagi kekuasaan”. Kemunculan tersebut bukan hanya meletakkan kembali nilai geopolitik wilayah pedalaman pada tataran tertinggi, tetapi juga menjustifikasi proses pemutlakan raja dan istananya sebagai pusat tunggal. Kesempurnaan figur raja pun berpadu dengan kesucian tanah subur di Dataran Kedu. Dataran inilah yang berperan sebagai pusat dari segala proses produksi ruang kekuasaan di Pulau Jawa pada abad ke-16 hingga abad ke-17.

Ciri utama dari produksi ruang kekuasaan tersebut adalah menegakkan kembali kekuasaan terpusat yang menjadi ciri khas tradisi sawah seraya mengedepankan politik anti-pesisir. Ciri ini ditandai oleh keputusan penguasa Mataram untuk meletakkan istananya di balik Gunung Merapi sehingga membelakangi pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa. Penguasa Mataram memilih untuk menghadapkan istananya ke Samudera Hindia yang sepi dan berombak ganas dibandingkan ke arah perairan utara yang tenang dan ramai di Laut Jawa. Ciri anti-pesisir ini dipertegas oleh klaim penguasa Mataram bahwa mereka bukan pedagang seperti raja-raja Jawa lainnya (Burhanudin, 2012), terutama raja-raja Banten dan Surabaya (Vlekke, 2008). Raja Mataram yang bernama Sultan Agung pun memutuskan hubungan dengan dunia perdagangan yang berkembang di pesisir (Reid, 1993; Burhanudin, 2012). Vlekke (2008) mendeskripsikan politik anti-pesisir tersebut sebagai berikut:

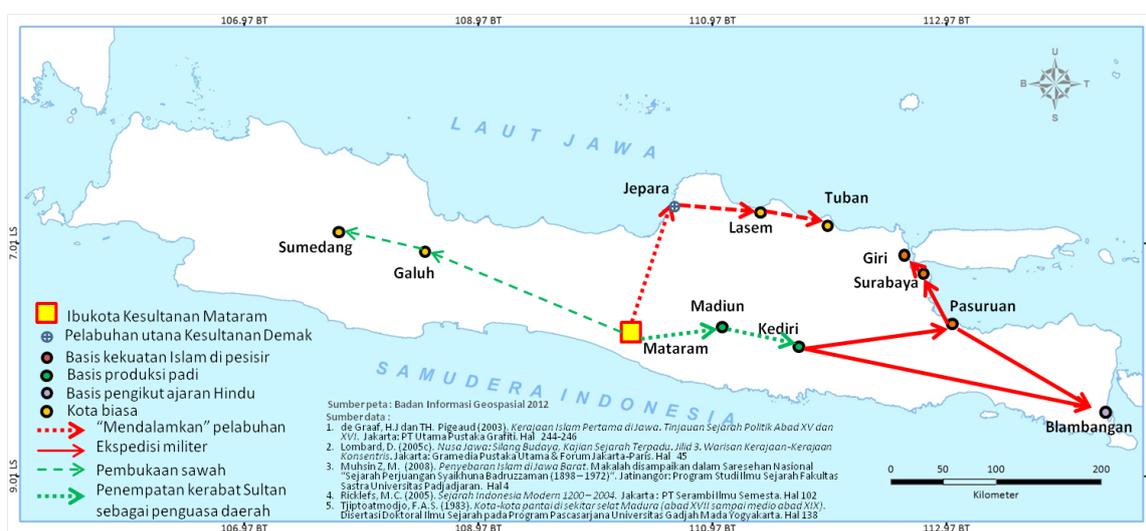
Bagaimanapun keadaannya, kita bisa dengan pasti menyimpulkan bahwa pada pergantian abad ke-16 menuju abad ke-17, pusat kekuasaan politik Jawa telah beralih sekali lagi ke pedalaman. Konsekuensinya bagi daerah-daerah pantai adalah bencana. Penguasa-penguasa di pedalaman itu dan para bangsawan terus hidup mengikuti tradisi kuno dan tidak ada tempat bagi para saudagar di dunia kesatria itu (Vlekke, 2008:117).

Politik anti-pesisir ini mencerminkan imajinasi spasial penguasa Mataram yang meyakini pesisir sebagai wilayah tercemar yang penuh dengan konflik dan ketidakstabilan (Lombard, 2005b). Pesisir dan perdagangan maritim dipandang sebagai elemen luar yang mengancam kemandirian dan kesucian kekuasaan. Nilai kemuliaan dan kesucian pesisir jauh lebih rendah dari pada pedalaman. Begitu pula dengan nilai ke”jawa”annya. Oleh sebab itu, ketika pedalaman diposisikan sebagai pusat, maka pesisir dipandang sebagai mancanegara atau daerah luar yang secara konseptual sama dengan pinggiran. Kategorisasi ini merupakan anti-tesis terhadap praktek kekuasaan Kesultanan Demak dua abad sebelumnya. Sesuai dengan kategori itu berkembang pula anggapan bahwa pesisir – terutama kota-kota pelabuhan yang memiliki kemandirian ekonomi – merupakan elemen yang mudah melepaskan diri. Anggapan ini berarti bahwa di pesisir tidak boleh ada dominasi kekuatan sentrifugal; sebagaimana diisyaratkan di bawah ini:

Di dalam negara agraris, gerak atau perubahan hanya mungkin dari pusat ke pinggiran Dan gerak tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh para pegawai yang merupakan pancaran kekuasaan raja sekaligus menjamin hubungan antara kraton dan daerah-daerah bawahannya (Lombard, 2005b: 143).

Bergerak dalam pusat lingkaran kekuasaan, para abdi raja berperan memancarkan kekuasaan raja sampai ke daerah-daerah kekuasaan yang terjauh. Mereka adalah miniatur sang penguasa. Sebagai “pancaran” raja, mereka harus menjamin keselarasan di bagian dunia (mikrokosmos) yang telah dipercayakan kepadanya. Namun dalam batasan ruang gerak yang dipercayakan kepadanya, para abdi raja juga memiliki suatu kekuasaan yang hampir mutlak. Mereka hidup dari kekuasaannya sebagaimana raja hidup dari kerajaannya (Lombard, 2005b: 72).

Berdasarkan pemaknaan pesisir sebagai “wilayah tercemar yang harus dinetralkan”, maka produksi ruang kekuasaan di Pulau Jawa pada abad ke-16 hingga ke-17 didominasi oleh netralisasi pinggiran (Gambar 5). Selain melalui penaklukan pesisir, produksi ruang kekuasaan juga dilakukan melalui mekanisme penggabungan wilayah-wilayah subur ke dalam suatu tatanan ruang konsentris yang secara keseluruhan berada di bawah kendali istana. Sejalan dengan konsep mancapat, segenap mekanisme tersebut ditujukan untuk memastikan agar setiap elemen mengakui dan setia kepada kedigdayaan pusat. Untuk itu ikatan sosial yang terbangun secara hirarkis-konsentris jauh lebih penting dari pada batas teritorial. Ikatan tersebut membentuk suatu poros yang bukan saja berfungsi sebagai garis kendali, tetapi juga sebagai garis kontak untuk kepentingan komunikasi (Santoso, 2008) sehingga dapat menjamin terbentuknya ketertiban yang ideal (Mulder, 2001).



Gambar 5. Proses dan Pola Spasial Produksi Ruang Kekuasaan di Pulau Jawa Abad XVI - XVII

Selama periode abad ke-16 hingga abad ke-17, sistem dan ideologi Kesultanan Mataram menjadi pola dominan di Pulau Jawa yang mana kesempurnaan, kesucian, dan kemutlakkan kekuasaan raja menjadi kode geopolitik terpenting. Berdasarkan kode geopolitik itu, raja dan istananya diposisikan sebagai “pusat dunia”. Pola ini melandasi proses pemulihan tatanan geopolitik bercorak hirarkis-konsentris di Pulau Jawa sesuai dengan promordialisme tradisi sawah yang telah diperkaya oleh tradisi India dan Islam. Sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya, netralisasi pinggiran dan pembukaan sawah mewarnai upaya pembentukan tatanan geopolitik ini. Para penguasa Mataram mempunyai andil besar dalam pembukaan Tanah Pasundan bagian timur sebagai bagian dari upaya men“dalam”kan elemen luar. Merujuk pada Lombard (2005b), produksi ruang kekuasaan

Kesultanan Mataram memperlihatkan bahwa upaya untuk mendirikan struktur kekuasaan yang mantap tidak dapat hanya bertumpu pada kekuatan senjata dan penaklukan penguasa local; tanpa tidak disertai pemulihan suatu tatanan agraris yang mapan seperti yang digambarkan di bawah ini:

Di tengah-tengah adalah kraton di mana terdapat kediaman raja dengan struktur “pemerintahan dalam”. Di sekitarnya terdapat ibukota atau nagara tempat kedudukan “pemerintah luar” dan para bangsawan. Di sekitar ibukota terdapat lingkaran nagaragung berupa tanah-tanah lungguh yang dipercayakan kepada para pangeran...sebagai sumber pajak bagi kraton. Lingkaran terluar dan terakhir adalah mancanagara atau “daerah luar” yang letaknya jauh dari pusat kekuasaan di mana raja mengangkat para bupati yang langsung tunduk pada kekuasaan kraton (Lombard, 2005b: 99).

Pertumbuhan Kota Sebagai Implikasi Teritorialisasi dalam Produksi Ruang Kekuasaan

Produksi ruang kekuasaan oleh Kesultanan Mataram selama abad ke-16 hingga ke-17 menimbulkan teritorialisasi hingga ke seluruh pulau, kecuali ujung barat Pulau Jawa. Produksi ruang kekuasaan tersebut ditandai oleh penaklukan dan penguasaan beberapa kota penting di Pulau Jawa. Kota-kota di pesisir utara mulai dari Demak hingga Surabaya dan Pasuruan berhasil direngkuh ke dalam kekuasaan Mataram. Begitu pula dengan kota-kota di pedalaman di bagian tengah hingga timur yang merupakan pusat produksi padi. Terakhir, kota dan pusat permukiman pada wilayah-wilayah depresi di Tanah Pasundan bagian timur.

Sebagian besar kota-kota di atas adalah produk sekaligus simbol dari rezim kekuasaan sebelumnya. Beberapa di antaranya seperti Surabaya dan Pasuruan dipandang sebagai kompetitor bagi penguasa Mataram (de Graaf dan Pigeud, 2003). Kompetitor adalah sumber ketidakstabilan yang tidak dapat diterima keberadaannya dalam konsep ruang tradisi sawah. Demi memulihkan tatanan geopolitik agraris, Kesultanan Mataram menyematkan identitas baru pada kota-kota tersebut demi merepresentasikan kekuasaannya. Sesuai dengan konsep “dominasi pusat tunggal”, kota-kota tersebut diberi identitas sebagai kota pinggiran. Pemberian identitas ini menandakan berlangsungnya netralisasi pinggiran. Dalam proses ini, kota-kota mengalami perubahan status dari elemen luar menjadi elemen dalam. Citra, karakter, serta kekuatan yang melekat pada setiap kota dinetralkan oleh Kesultanan Mataram. Satu-satunya citra yang harus ditampilkan adalah kewibawan dan kesempurnaan kekuasaan raja.

Implikasi terberat dari penyematkan identitas baru ini dialami oleh kota-kota pesisir seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Surabaya yang pada abad sebelumnya dikenal sebagai pusat perdagangan maritim. Netralisasi pinggiran yang dilakukan oleh Kesultanan Mataram berhasil mengakhiri kebebasan serta kemandirian ekonomi kota-kota tersebut (Vlekke, 2008). Meskipun tetap diposisikan sebagai pelabuhan, kedudukan Jepara sebagai pusat perdagangan maritim menurun karena berkurangnya kebebasannya untuk bergerak ke luar (Mulyana, 2003). Kota pelabuhan Gresik juga mengalami kemunduran akibat adanya pungutan yang relatif tinggi terhadap keuntungan perdagangan maritim (Schrieke, 1957). Identitas Gresik pun berganti menjadi kota pasar guna tempat menampung hasil bumi dari pedalaman melalui Bengawan Solo (Tjiptoatmodjo, 1983). Surabaya dijadikan sebagai “pusat di pinggiran” demi mewakili kepentingan raja di bagian timur Pulau Jawa (Lombard, 2005b). Penaklukan Surabaya pada dekade kedua abad ke-17 menjadi tanda berakhirnya netralisasi pesisir. Meskipun dapat terus bertahan sebagai kota pelabuhan (Rutz, 1987), namun kedudukan geopolitik Surabaya tidak mampu menandingi reputasi Mataram yang lebih

bercorak agraris. Beberapa kota di pesisir seperti Pati, Kudus, dan Grobogan juga segera mengakui kedudukan Sultan Mataram sebagai penguasa Pulau Jawa (de Graff dan Pigeaud, 2003).

Dalam kondisi di bawah politik anti-pesisir, identitas kota-kota tersebut sebagai “pembangkit gerakan ke luar” diubah menjadi “pemberi keuntungan bagi pusat”. Eksistensi mereka tidak lagi identik dengan aktivitas pelabuhan. Kota-kota pelabuhan ditempatkan sebagai titik-titik terluar dan terjauh dari pusat kekuasaan yang sepenuhnya dikendalikan oleh istana. Mereka adalah simbol kekuasaan dan kepanjangan tangan raja di pinggiran. Kedudukan masa lalu kota-kota tersebut sebagai “entitas yang menentukan” kini menurun menjadi “entitas yang ditentukan”. Perdagangan maritim hanya dipandang sebagai sumber hadiah atau pungutan bagi istana (Reid, 1999).

Bersamaan dengan hilangnya peran pelabuhan, hilang pula gaya-gaya sentrifugal yang digerakan olehnya. Hal ini berimbas pada melemahnya eksistensi masjid sebagai pusat yang menyeimbangkan dan meredam gaya sentrifugal tersebut. Daya tawar masjid di hadapan istana mengalami penurunan drastis. Konsep manunggaling kawula gusti juga turut mengurangi peran penting masjid baik sebagai pemberi legitimasi kesucian maupun simpul integrasi sosial bagi kepentingan kekuasaan raja. Para ulama tidak lagi sepenuhnya memegang kekuasaan religius. Dalam Kesultanan Mataram, ulama adalah pegawai kerajaan (Burhanudin, 2012). Kedudukan mereka terbungkus dalam absolutisme kekuasaan raja.

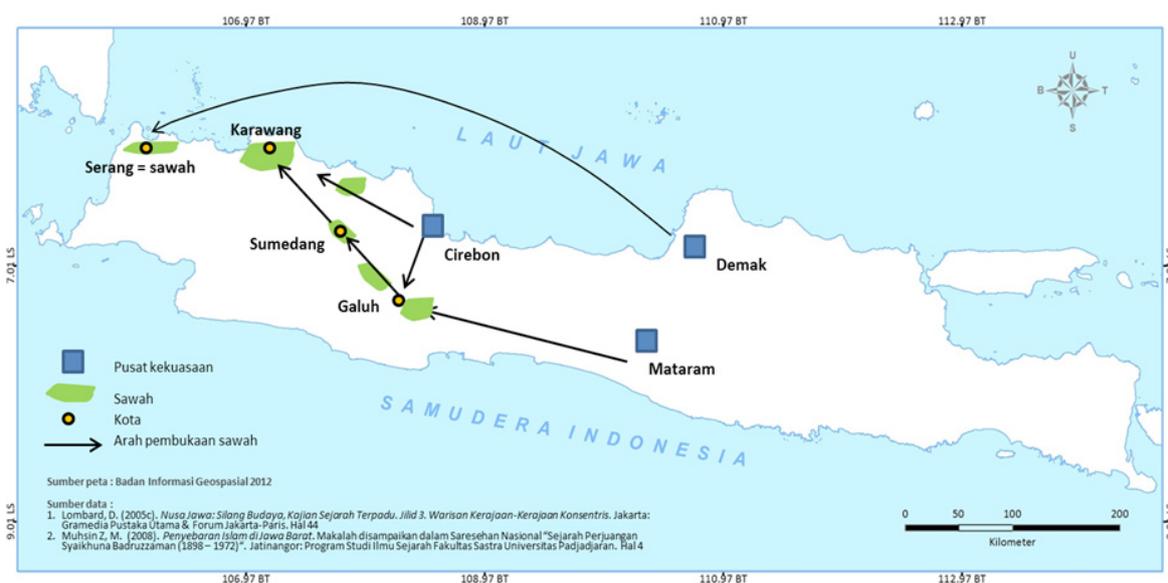
Menurunnya peran dan kedudukan politik para ulama berakibat pada hilangnya identitas beberapa kota pesisir yang pada abad ke-15 dikenal sebagai kota suci atau kota dakwah. Kota-kota tersebut selalu diidentikkan dengan eksistensi para ulama terutama Wali Songo di masa itu. Tempat tersebut menjadi tempat Wali Songo bermukim dan memusatkan kegiatan dakwahnya. Namun saat ini ulama dan masjidnya tidak lagi berperan sebagai penentu eksistensi kota. Seiring dengan itu, runtuh pula simpul-simpul “jaringan orang suci” yang sesungguhnya menjadi akses utama para ulama untuk memasuki lingkaran terdalam kekuasaan politik (Burhanudin, 2012).

Implikasi lebih lanjut dari keruntuhan ini adalah hancurnya dwi-tunggal antara Demak dan Jepara yang sesungguhnya mencerminkan kolaborasi antara istana (kekuasaan politik/raja), masjid (kekuasaan religius/ulama), dan pelabuhan (kekuasaan ekonomi/pedagang). Pelabuhan dan masjid tidak lagi menjadi komponen utama pembentuk identitas kekuasaan. Istana dengan demikian muncul sebagai satu-satunya pusat. Proses pemutlakan kekuasaan raja pun berlangsung tanpa halangan. Pemutlakan tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari proses penterjemahan ajaran Islam ke dalam tradisi sawah yang berlaku di Pulau Jawa; yang di dalamnya terdapat lapisan tebal unsur-unsur India.

Penterjemahan itu memunculkan kembali mitos “gunung suci” yang kemudian dijadikan sebagai salah satu alasan untuk memunculkan istana pada dataran subur di sekitar kaki gunung.

Demi memulihkan tatanan agraris para penguasa Mataram juga memerintahkan pembangunan jaringan irigasi seperti di Kali Winonga dan di Kali Bedog (Lombard, 2005b). Pembangunan irigasi ini merupakan bagian dari strategi Mataram untuk memantapkan kehidupan ekonomi demi menopang struktur kekuasaannya khususnya ke arah pedalaman (Lombard, 2005c). Modus produksi ini memberikan keuntungan bagi kota-kota yang terletak di lembah-lembah sungai besar, seperti Lembah Madiun dan Lembah Brantas. Kota Madiun, Kediri, dan Malang yang pernah berjaya secara politik dan ekonomi sebagai basis kekuasaan Hindu di Pulau Jawa pada abad ke-10 hingga ke-11; memperoleh momentum untuk muncul kembali meskipun hanya sebagai kota pinggiran. Selain ketiganya, pusat-pusat permukiman juga muncul di Banyumas, Kedu, Ungaran, Salatiga, Wates, Magetan, Grobogan, Nganjuk, Kertosono, Probolinggo, dan Besuki (Rutz, 1987). Penguasa Mataram juga membuka

persawahan hingga memasuki Tanah Pasundan yang berakar pada tradisi ladang. Pembukaan persawahan ini menyusup ke wilayah-wilayah depresi yang tersembunyi di antara puncak-puncak gunung di wilayah pegunungan Pasundan hingga akhirnya mencapai Dataran Sumedang (Gambar 6). Selanjutnya, proses tersebut meluas ke arah barat hingga mencapai tepi Ci Manuk. Gerakan ini disebut oleh Lombard (2005c) sebagai “pembukaan Tanah Pasundan”. Gerakan ini berhasil menjadikan Sumedang sebagai vasal Kesultanan Mataram. Penguasa Sumedang diangkat menjadi “koordinator” kekuasaan Mataram di Tanah Pasundan (Muhsin, 2008). Sumedang kini menjadi titik pancar utama bagi kekuasaan Raja Mataram di Tanah Pasundan. Tanah-tanah di wilayah ini pun berada di bawah penguasaan Sultan Mataram. Sejalan dengan itu, muncul beberapa pusat permukiman di sepanjang jalur persawahan seperti Dayeuh Luhur, Limbangan, Balubur, Ciamis, dan Dayeuh Kolot (Rutz, 1987). Kemunculan pusat-pusat permukiman ini dapat dipahami sebagai bentuk teritorialisasi Kesultanan Mataram agar dapat mengendalikan secara sekaligus tanah dan tenaga kerja.



Gambar 6. Produksi Ruang Kekuasaan di Tanah Pasundan Melalui Pembukaan Sawah

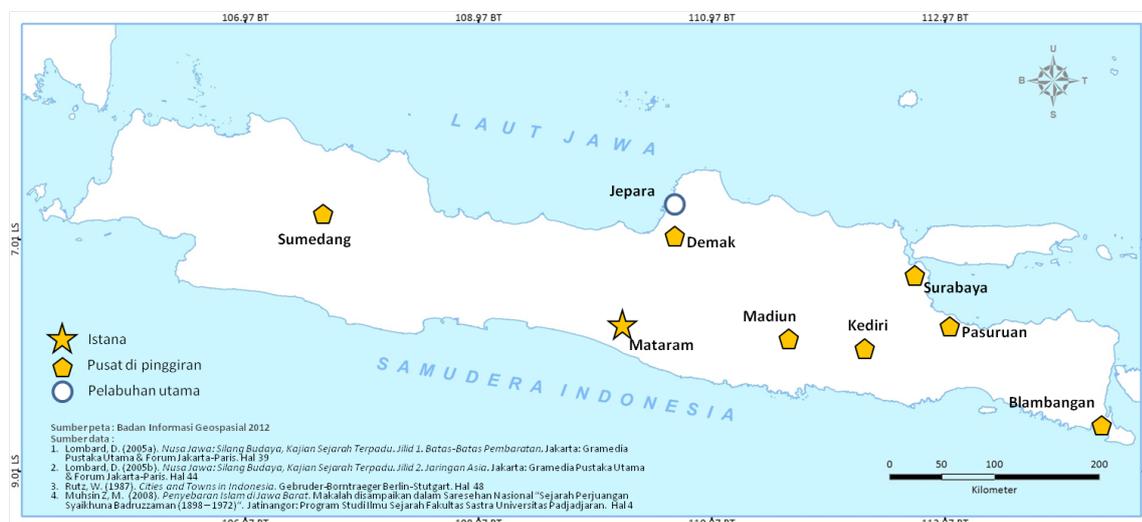
Tahun 1625 sebagian besar pesisir utara Jawa hingga Pasuruan telah berada di bawah kendali Mataram (Rutz, 1987). Hanya Kesultanan Banten dan Cirebon yang relatif bebas dari pengaruh kekuasaan Sultan Mataram. Sejak jatuhnya kekuasaan Demak, kedua kesultanan yang terletak di bagian barat tersebut memperoleh keuntungan ekonomi tersendiri dan berkembang sebagai simpul transportasi laut ke arah Selat Sunda dan Selat Malaka. Sejak abad ke-16, Cirebon tetap bertahan sebagai kota persilangan (Lombard, 2005a). Keuntungan ekonomi yang diterimanya memungkinkan Cirebon untuk membina hubungan dagang hingga ke pedalaman. Adapun Banten melakukan hal yang sama

hingga menjangkau tempat-tempat penanaman lada di bagian selatan Sumatera.

Secara keseluruhan, netralisasi dan pembentukan wilayah pinggiran oleh Kesultanan Mataram telah menciptakan integrasi regional yang lebih mantap di Pulau Jawa pada abad ke-17, terutama di bagian tengah hingga timur. Kesultanan Mataram berhasil memulihkan kembali tatanan geopolitik negara agraris di Pulau Jawa yang sempat merosot selama abad ke-15 hingga ke-16 (Lombard, 2005b). Ibukota Kesultanan Mataram beserta istananya muncul sebagai geopolitical

heartland yang baru di Pulau Jawa. Sementara itu, kota-kota lainnya baik di pesisir maupun di pedalaman dijadikan sebagai “pusat-pusat kecil” atau “pusat di pinggiran” (Gambar 7). Kota-kota tersebut adalah titik pancar kekuasaan raja guna menjaga keajegan hubungan

antara pusat kekuasaan di Mataram dengan basis-basis produksi pertanian di pedalaman serta kota-kota pasar di pantai utara Pulau Jawa.



Gambar 7. Kota-kota Beridentitas “Pusat Di Pinggiran” di Pulau Jawa Abad XVI --XVII

Seperti halnya di pusat kekuasaan Mataram, simbol terpenting yang merepresentasikan pusat-pusat kecil adalah istana para penguasa lokal (bupati). Di pesisir utara, istana para bupati dengan segera mengikis peran penting masjid dan pelabuhan yang pada abad ke-15 menjadi simbol kebangkitan kota-kota pesisir. Identitas kota-kota pesisir sebagai kota dakwah, kota suci, dan kota pelabuhan pun menghilang. Sebaliknya, keberadaan istana para bupati justru mengembalikan identitas beberapa kota pedalaman – terutama yang terletak pada dataran-dataran subur – sebagai pusat kekuasaan politik walaupun pada tataran yang lebih rendah dibandingkan masa sebelumnya.

Kemunculan serta keruntuhan yang dialami oleh kota-kota di atas menunjukkan terjadinya proses likuidasi politik. Proses ini menggambarkan upaya suatu rezim kekuasaan untuk mengkonversi aset-aset kekuasaan yang dimiliki oleh rezim lainnya. Konversi tersebut dapat berlangsung baik secara ideologis maupun non-ideologis. Likuidasi politik dimaksudkan untuk menghapus eksistensi suatu kekuasaan lama demi membangun kekuasaan baru.

Likuidasi politik atas suatu kota tidak terlepas dari peran pentingnya sebagai simbol kekuasaan. Apapun wujudnya, simbol kekuasaan mengandung kekuatan untuk membentuk, membangun, serta melestarikan eksistensi suatu kekuasaan (Fashri, 2007). Perubahan identitas suatu kota sebagai akibat dari likuidasi politik dapat merubah makna simbolik yang terkandung oleh kota tersebut sehingga mengguncang eksistensi kekuasaan. Mengingat kota merupakan aktualisasi spasial dari kekuasaan, perubahan identitas kota juga

akan memperlemah ikatan antara kekuasaan dan teritorinya. Orientasi politik kota akan beralih dari kepentingan kekuasaan yang lama dan ke yang baru.

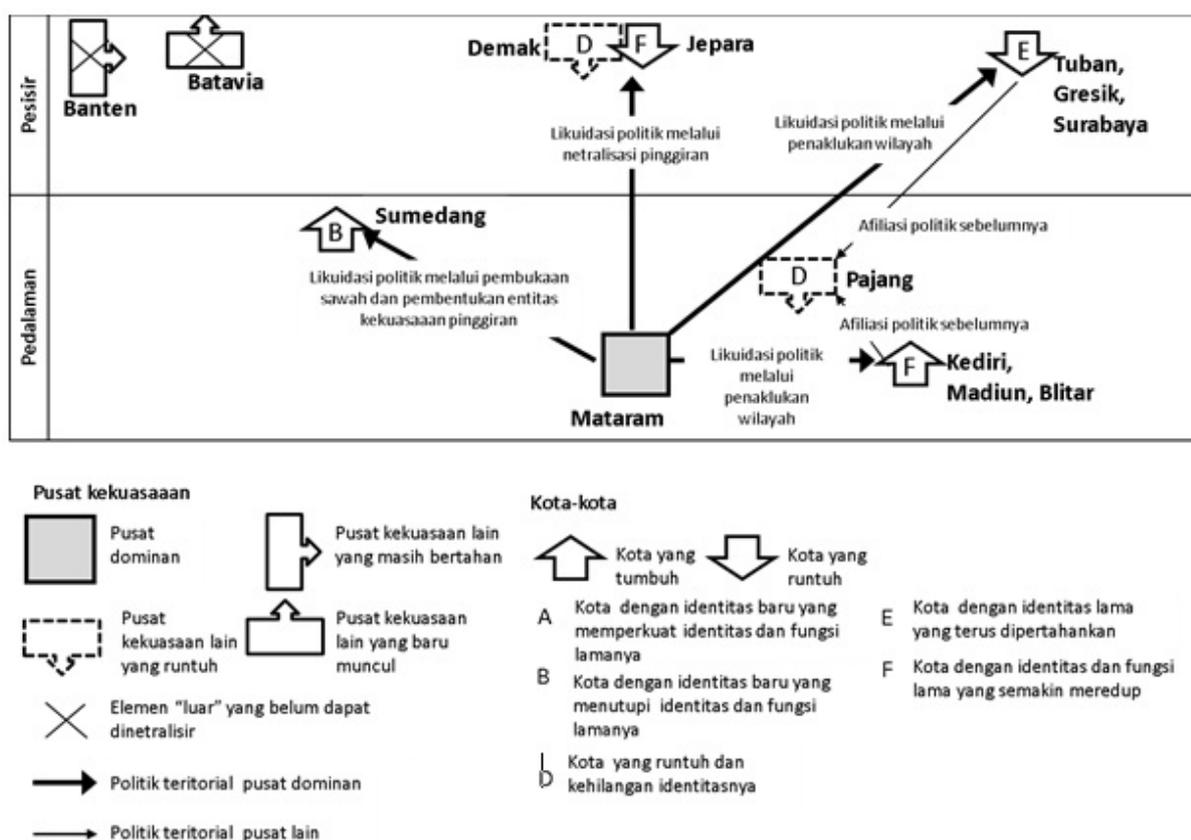
Netralisasi dan pembentukan pinggiran yang dilakukan oleh Kesultanan Mataram dengan demikian dapat dipahami sebagai bagian dari likuidasi politik. Penguasa Mataram merumuskan ulang (re-conception) teritori kekuasaannya yang diwariskan dari Kesultanan Demak. Dalam proses tersebut, penguasa Mataram mendefinisikan kembali pola keterikatan yang dipandang paling ideal antara teritori, tradisi kekuasaan, dan kepentingan penguasa. Perumusan ulang ini berimplikasi pada berubahnya aktualisasi spasial dari kekuasaan yang tercermin dari perubahan identitas serta makna simbolik kota. Ketika lingkungan alam pesisir utara yang berupa dataran luas dan perairan tenang tidak lagi dipandang sebagai wilayah ekonomi maritim, pada saat itu kota-kota pesisir kehilangan identitasnya sebagai pelabuhan. Demikian pula ketika kesucian dan kesempurnaan kekuasaan raja diidentikan dengan puncak-puncak gunung dan dataran subur, identitas beberapa kota suci di pesisir pun turut memudar.

Produksi ruang kekuasaan (Gambar 8) di Pulau Jawa selama abad ke-16 hingga abda ke-17 juga memperlihatkan adanya gejala cultural imposition atau pembebanan kebudayaan, terutama di Tanah Pasundan. Dalam hal ini para penguasa Mataram bukan hanya merubah status Tanah Pasundan dari “elemen luar” menjadi “elemen dalam”, tetapi juga membawa masuk gagasan-gagasan tradisi sawah ke dalam kehidupan para peladang di Tanah Pasundan. Tanah Pasundan kini berstatus pinggiran. Sejalan dengan itu muncul

kota Sumedang dan beberapa kota lainnya di wilayah-wilayah depresi Tanah Pasundan bagian timur yang merepresentasikan kekuasaan Mataram. Sumedang adalah “Jawa di Tanah Pasundan”. Ditinjau sudut pandang Kesultanan Mataram, hal ini menggambarkan keberhasilan perluasan tatanan konsentris negara agraris.

Merujuk pada uraian di atas, salah satu gejala terpenting dari pertumbuhan kota di Pulau Jawa selama abad ke-16 hingga ke-17 adalah terlepasnya identitas beberapa kota dari fondasi lamanya yang menandakan terjadinya gejala deteritorialisasi. Kota-kota bukan hanya diganti identitasnya, tetapi juga diputus keterikatannya dengan teritori lamanya. Fondasi baru bagi pertumbuhan dan keberlanjutan kota-kota kini

dibentuk secara sentrifokal oleh suatu pusat tunggal di pedalaman. Irama serta gerak pertumbuhan kota tidak lagi ditentukan oleh endowment factors yang tersedia di pada lokasi dan hinterland-nya, tetapi lebih ditentukan oleh loyalitasnya terhadap pusat. Tujuannya adalah untuk mempertegas eksistensi kekuasaan absolut guna menutup kemungkinan terbentuknya pluralisme kekuasaan yang dapat berakibat pada perpecahan teritorial. Pinggiran atau mancanegara tidak boleh tumbuh sebagai pusat besar. Pusat dan pinggiran tidak dapat berganti peran. Kekuasaan absolut pun tidak dapat dipindahkan begitu saja dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Perpindahan pusat hanya mungkin dilakukan jika didahului oleh perombakan fundamental terhadap tradisi serta identitas kekuasaan.



Gambar 8. Implikasi Produksi Ruang Kekuasaan Terhadap Pertumbuhan Kota di Pulau Jawa Abad XVI - XVII

KESIMPULAN

Selama rentang waktu abad ke-16 hingga abad ke-17 pola dan proses spasial produksi ruang ditujukan untuk menjamin terbentuknya absolutisme kekuasaan raja sesuai dengan konsep ruang tradisi sawah yang telah diperkaya oleh unsur-unsur India dan Islam. Produksi ruang kekuasaan dilakukan melalui netralisasi dan pembentukan wilayah pinggiran. Modus produksi ini menyebabkan terjadinya likuidasi politik terhadap

kota-kota tertentu yang ditandai oleh perubahan identitas kota. Selain itu, di wilayah pesisir perubahan identitas tersebut menyebabkan beberapa kota pesisir kehilangan peran pentingnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adian, D.G. (2006). Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar Komprehensif. Yogyakarta: Jalasutera.

- Agnew, J. (2001). The New Global Economy: Time-Space Compression, Geopolitics, and Global Uneven Development. *Journal of World-Systems Research*, 7(2), 133 – 154.
- Bellwood, P. (2000). Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia. Terjemahan oleh T.W Kamil. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Blomley, N. (2006). Uncritical critical geography. *Progress in Human Geography*, 30, 87 – 94.
- Braudel, F. (1979). *The Perspective of the World, Civilizations and Capitalism 15-18th Century Vol. 3*. Paris: Librarie Armand Colin.
- Burhanudin, J. (2012). Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia. Jakarta : Mizan.
- Buttimer, A. (2003). Human Geography as Social Science: Retrospect and Prospect. *Erdkunde*, 57 (4), 263 – 271.
- Cavalero, D. (2004). Teori Kritis dan Teori Budaya. Yogyakarta: Niagara.
- Coedès, G. (2010). Asia Tenggara Masa Hindu-Budha. Seri Terjemahan Arkeologi No.10. Terjemahan oleh Partaningrat Arifin. Jakarta: KPG, École française d'Extrême-Orient, Forum Jakarta-Paris, Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional
- Cox, K.R. (2005). From Marxist Geography to Critical Geography and Back Again. Department of Geography, The Ohio State University, di akses dari <http://geog-www.sbs.ohio-state.edu/faculty/kcox/Cox9.pdf> pada 28 Oktober 2005.
- de Graaf, H.J & Pigeaud, T.H. (2003). Kerajaan Islam Pertama di Jawa. Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI. Jakarta: PT Utama Pustaka Grafiti.
- Dikshit, R.D. (1982). *Political Geography: A Contemporary Perspective*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Limited Company.
- Evers, H. & Korff, R. (2002). Urbanisasi di Asia Tenggara, Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-Ruang Sosial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Fashri, F. (2007). Penyingkapan Kuasa Simbol, Apropriasi Reflektif Pemikiran Piere Bourdie. Yogyakarta: Juxtapose
- Fields, G. (1999). City Systems, Urban History, and Economic Modernity: Urbanization and the Transition from Agrarian to Industrial Society. *Berkeley Planning Journal*, 13, 102 – 128.
- Furnivall, J.S. (2009). Hindia Belanda, Studi tentang Ekonomi Majemuk. Jakarta : Freedom Institute.
- Geertz, C. (1983a). Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Geertz, C. (1983b). Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia. Terjemahan oleh S. Supomo. Jakarta: Bhratara Karya Akasara.
- Gilbert, A. & Gugler, J.. (2007). Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Heine-Geldern, R. (1942). Conceptions of State and Kingship in Southeast Asia. *The Journal of Asian Studies*, 2 (1), 15 – 30.
- Hoggart, K., Lees, L. & Davies, A. (2002). *Researching Human Geography*. London: Arnold Publisher.
- Johnston, R.J. (1983). *Philosophy and Human Geography*. London: Edward Arnold.
- Johnston, R.J, Gregory, D., Pratt, G. & Watts, M. (2000). *The Dictionary of Human Geography*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Jordan, R. 2009. Memuji Prambanan. Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. Terjemahan ke dalam Bahasa Inggris oleh Donald Nicholson-Smith. New York: Blackwell Publishing Ltd.
- Lombard, D. (2005a). Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu. Jilid 1. Batas-Batas Pembaratan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & Forum Jakarta-Paris.
- Lombard, D. (2005b). Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu. Jilid 2. Jaringan Asia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & Forum Jakarta-Paris.
- Lombard, D. (2005c). Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu. Jilid 3. Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & Forum Jakarta-Paris.
- Mamadouh, V.D. 1998. Geopolitics in the Nineties: One Flag, Many Meanings. *GeoJournal*, 46, 237 – 253.
- Milun, K. (2007). *Pathologies of Modern Space*. New York and London: Routledge.
- Moertono, S. (1968). *State and Statecraft in Old Java, A Study of the Later Mataram Period 16th to 19th Century*. Monograph Series. New York: Southeast Asia Program Department of Asian Studies Cornell University.
- Muhsin Z.M. (2008). Penyebaran Islam di Jawa Barat. Makalah disampaikan dalam Saresehan Nasional Sejarah Perjuangan Syaikhuna Badruzzaman (1898 – 1972). Jatinangor: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.
- Mulder, N. (2001). *Mistisme Jawa, Ideologi di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS.
- Mulyana, S. (2005). Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara. Yogyakarta : LKIS.
- O'Tuathail, G. & Dalby, S. (1998). Introduction: Rethinking Geopolitics: Toward a Critical Geopolitics. dalam O'Tuathail, G. & S. Dalby (Eds). *Rethinking Geopolitics*. London & New York: Routledge.

- Raffles, T.S. (1817). *The History of Java*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Rahardjo, S. (2007). *Kemunculan dan Keruntuhan Kota-Kota Pra-Kolonial di Indonesia*. Depok: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.
- Rahardjo, S. (2011). *Peradaban Jawa: Dari Mataram Kuno Hingga Majapahit Akhir*. Depok: Komunitas Bambu.
- Reid, A. (1992). *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680: Tanah di Bawah Angin*. Terjemahan Mochtar Pabotinggi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Reid, A. (1999). *Dari Ekspansi Hingga Krisis: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450-1680*. Terjemahan R.Z. Leirissa dan P. Soemitro. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Ricklefs, M.C. (1998). *The Seen and Unseen World in Java, 1726-49: History literature and Islam in the Court of Pakubuwana II*. Honolulu: Asian Studies Association of Australia, Allen & Unwin dan University of Hawai'i Press.
- Ricklefs, M.C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Ricklefs, M.C., Lockhart, B., Lau, A., Reyes, P. & Aung-Thwin, M. (2013). *Sejarah Asia Tenggara, Dari Masa Prasejarah sampai Kontemporer*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Ricouer, P. (2008). *Hermeneutika Ilmu Sosial*. Terjemahan oleh Muhammad Syukri. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Ritzer, G. & Goodman, D.J. (2003). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Rutz, W. 1987. *Cities and Towns in Indonesia*. Berlin-Stuttgart: Gebruder-Borntraeger
- Santoso, J. (2008). *Arsitektur Kota-Kota Jawa: Kosmos, Kultur, dan Kuasa*. Jakarta: Centropolis-Magsiter Teknik Perencanaan Universitas Tarumanegara.
- Schrieke, B. (1957). *Indonesian Sociological Studies: Ruler and Realm in Early Java*. Bandung: W. van Hove Ltd - The Hague.
- Smith, N. & P. O'Keefe. (1980). *Geography, Marx and the Concept of Nature*. *Antipode*, 12, 30 – 39.
- Soja, E.W. (1980). *The Sociospatial Dialectic*. *Annals of the Association of American Geographers*, 70, 207 – 255.
- Soja, E.W. (2000). *Postmetropolis, Critical Studies of Cities and Regions*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Sumardjo, J. (2002). *Arkeologi Budaya Indonesia*. Yogyakarta: Qalam.
- Sumardjo, J. (2007). *Paham Kekuasaan Sunda*. *Pikiran Rakyat* tanggal 17 Nopember 2007 diunduh dari <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/112007/17/0901.htm>
- Sunyoto, A. (2012). *Atlas Wali Songo*. Jakarta: Pustaka IIMaN, Trans Pustaka, dan LTN PBNU.
- Taylor, J.T. (1993). *Political Geography : World Economy, Nation-State, and Locality*, 3rd Edition. New York: Longman Scientific & Technical.
- Tjiptoatmodjo, F.A.S. (1983). *Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura (abad XVII Sampai Medio Abad XIX)*. Disertasi Doktoral. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Tuan, Y. (1977). *Space and Place: The Perspective of Experience*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- van Setten van der Meer, N.C. (1979). *Sawah Cultivation in Ancient Java*. Canberra : Australian National University Press.
- Vlekke, B.H.M. (2008). *Nusantara, Sejarah Indonesia*. Jakarta: KPG.
- Wessing, R. (2008). *Constituting the world in the Sundanese House*. dalam Schefold, R., Nas, P.J.M., Domenig, G. & Wessing, R. (eds). *Indonesian Houses Volume 2 Survey of Vernacular Architecture in Western Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Wittfogel, K. (1957). *Development Aspects of Hydraulic Societies. Irrigation Civilization : A Comparative Study*. Social Science Monograph. Washington DC: Department of Cultural Affairs, Pan American Union.
- Zoetmulder. (2000). *Manunggaling Kawula Gusti : Pantheisme dan Monotheisme dalam Sastra Suluk Jawa*. Jakarta: Gramedia.